

4. Kegiatan pasca bencana sebagai upaya pemulihan dampak bencana harus mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana;
5. Sosialisasi terkait dengan kesadaran masyarakat dalam mendirikan bangunan khususnya di daerah pedesaan. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan terkait bahaya pendirian bangunan di daerah rawan bencana dan larangan mendirikan bangunan di daerah lindung;
6. Kapasitas Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan salah satunya dengan melaksanakan prioritas kegiatan yang tertulis dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Pelatihan terkait dengan kebencanaan juga harus terus dilakukan bersama dengan masyarakat baik melalui program yang telah dimiliki atau melalui sosialisasi ke daerah, untuk membangun masyarakat yang sadar dan tangguh bencana, sehingga masyarakat menyadari akan bahaya bencana; dan
7. Sinergitas penanggulangan bencana antara Pemerintah Daerah dan DPRD harus ditingkatkan untuk membangun komitmen bersama dalam manajemen bencana dan meningkatkan dukungan politis. Melalui fungsi dan peran yang dimiliki DPRD, maka DPRD memiliki wewenang untuk mendorong dan mengupayakan yang hubungannya dengan Perda, perencanaan pembangunan, dan penganggaran dalam kebencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amri, Robi Mohd, dkk. 2016. *RBI: Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB Direktorat Pengurangan Risiko Bencana
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana
- Haryono, Riyadi dkk. 2012. *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Kaho, Josef Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Miles, M. B. & A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: UI PRESS
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: ITS Press
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Dari Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thoha, Miftah. 2009. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Yulaelawati, Ella & Usman Syihab. 2008. *Mencerdasi Bencana*. PT Grasindo Anggota Ikapi: Jakarta

**Jurnal**

- Fuzi, Lukman Munawar. 2016. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Proses Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. VI No.2
- Ginting, Yosep & Sorni Paskah Daeli. 2012. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri*.
- Hapsari, Adhela Mahda & Titik Djumiarti. 2016. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review* 5 (2), 1004-1015
- Nasyiruddin, dkk. 2015. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Pemerintahan: Otoritas* Vol. V No.2
- Ningtyas, M. Ratna Juwita, dkk. 2014. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No. 4, Hal 687-693
- Potter, Christopher and Richard Brough. 2004. *System Capacity Building: A Hierarchy of Needs*. India: Oxford University Press
- Rachmatullah, Michael dkk. 2016. Evaluasi Kebijakan Pola Ruang dan Struktur Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Banjir (Studi Kasus: Kota Palu)
- Reddy, Purshottama, dkk. 2015. *The State of Local Government*. Mykolas Romeris University Public Policy and Administration ISSN online 2029-2872 Vol. 14, No. 3 hal. 160-176
- Riyadi, dkk. 2017. Kajian Kapasitas Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kedepkatan Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara
- Rožen, Toma. 2013. *Administrative Capacity of Local Governments: Political Dimension*. *Lex Localis Journal of Local Self-Government* Vol. 11, No. 3, Hal. 387-407
- UNDP. 1998. *Capacity Assessment and Development in a System and Strategic Management Context*. Technical Advisory Paper 3
- UNDP. 2008. *Supporting Capacity Development The UNDP Approach*

### **Artikel Koran BNPB**

Pusdatinmas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2017. *Info Bencana: Informasi Kebencanaan Bulanan Terkini Edisi Desember 2016*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **Blog**

Idhom, Addi M. 2017. *Banjir dan Longsor di Pacitan: 11 Korban Tewas dan 13 Desa Terendam*. Artikel tersedia online di: [https://tirto.id/banjir-dan-longsor-di-pacitan-11-korban-tewas-dan-13-desa-terendam-cAQj?gclid=CjwKCAjwvbLkBRBbEiwAChbckfIndFyzY5KEQbcQu0ktwA4kymSGTTyAS13nuA0TIHF7gnFnULNWhoCU4IQAvD\\_BwE](https://tirto.id/banjir-dan-longsor-di-pacitan-11-korban-tewas-dan-13-desa-terendam-cAQj?gclid=CjwKCAjwvbLkBRBbEiwAChbckfIndFyzY5KEQbcQu0ktwA4kymSGTTyAS13nuA0TIHF7gnFnULNWhoCU4IQAvD_BwE)

Nurita, Dewi & Erwin Prima. 2017. *Banjir dan Longsor di Pacitan, 20 Orang Meninggal Dunia*. Tersedia online di: <https://nasional.tempo.co/read/1038971/banjir-dan-longsor-di-pacitan-20-orang-meninggal-dunia/full&view=ok>

### **Dokumen**

BNPB & JICA. 2015. *Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah tingkat Kabupaten/Kota*. Proyek Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi BNPB dan BPBD

### **Undang-Undang, Peraturan, dan Keputusan**

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tiga Sumber Dana Penanggulangan Bencana

Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/ 1188 /KPTS/408.12/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan bencana lainnya di Kabupaten Pacitan tahun 2017.

Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/ 1189 /KPTS/408.12/2017 tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Bencana lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/ 1190 /KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan.